

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Patronase merupakan hubungan dua arah antara patron dan klien, patron adalah individu ataupun kelompok yang memiliki sumber daya (materil dan non-materil) dibandingkan dengan klien, sedangkan sumber daya adalah dimana aktor memiliki kontrol serta memiliki kepentingan tertentu, sumber daya juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bisa dikendalikan oleh aktor (Andrews & Ritzer, 2018).

Dalam patronase politik dimaknai hubungan antara patron dan klien dalam ruang lingkup atau dinamika politik, dan hubungan dua arah antara elite partai politik (parpol) dengan para pemilih, pegiat kampanye, birokrasi pemerintahan ataupun organisasi masyarakat dengan adanya tujuan untuk kepentingan-kepentingan. Dalam patronase politik adanya hubungan relasi sosial yang dikapitalisasi dengan bentuk jaringan untuk tujuan kekuasaan. Salah satu kepentingan itu adalah untuk meraup suara kemenangan pemilihan dalam dinamika ruang lingkup politik, dengan dibantu oleh broker klientelisme. Broker bisa dikatakan sebagai “penghubung” atau “pedagang” dalam praktik politik yang menjadi jaringan untuk saling berinteraksi (Dadang Sufianto, Agus Subagyo, 2017).

Hubungan patronase politik yang diberikan seperti uang, barang atau benda, pelayanan atau servis jasa, dan juga peluang ekonomi. Dalam patronase politik bisa dibagi dalam kategori sebagai penerima dan pemberi: sebagai penerima seperti individu, golongan, komunitas berdasarkan wilayah geografis. Sementara sebagai pemberi seperti individu atau golongan yang memiliki sumber daya di atas rata-rata.

Patronase politik biasanya terjadi sebelum dan pada saat pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) lima (5) tahunan dalam pemilihan calon legislatif dan pemilihan presiden, atau juga sesudah pelaksanaan pemilihan. Selain itu patronase politik yang terjadi diluar dari yang sudah disebutkan sebelumnya adalah: seperti pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan juga dalam birokrasi pemerintahan.

Partai politik pada saat ini lebih cenderung melakukan hubungan patronase politik dengan siapapun, dengan alasan untuk meraih suara mayoritas dan kemenangan, sebagai contoh yang pernah terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam ketika Partai lokal daerah Aceh dalam pemilihan umum tahun 2009 melakukan patronase politik dalam mencapai konsolidasi untuk tujuan kepentingan partai politiknya (Darwin, 2016).

Hubungan patronase politik semakin lama semakin meluas dalam dinamika politik, terjadi juga di wilayah lain pada pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur di Daerah

Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menggandeng organisasi masyarakat (ormas) dalam meraup suara pemenang, yaitu organisasi masyarakat Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), yang seharusnya independen karena adanya hubungan patronase politik menjadi perpanjangan elite politik dan elite partai politik (Darwin, 2016). Dari hubungan dua arah patronase politik menyebabkan terjadinya relasi kekuasaan, aliansi politik, klientelisme, dan politik uang (As'ad, 2016).

Partai politik yang ada di Indonesia pada mulanya secara umum terdiri dari gabungan berbagai organisasi sehingga dapat berdiri sebagai sebuah partai politik, selain itu memiliki organisasi sayap, satuan petugas (satgas), laskar, dan juga organisasi masyarakat. Partai politik dengan sengaja membentuk bagian organisasi masyarakat sebagai jejaring sub-kontrak dalam memperluas kontrol sosial dan juga kontrol politik dalam masyarakat (Pahlevi et al., 2020).

Golkar awalnya dikenal dengan sebutan Sekretariat Bersama Golkar (Sekber Golkar). Berdirinya Partai Politik Golkar (Golongan Karya) yang pada masa awal terdiri dari beberapa organisasi seperti SOKSI (Sentra Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia), GAKARI (Gerakan Karyawan Republik Indonesia), BPPK (Badan Pembina Potensi Karya), KOSGORO (Koperasi Simpan Gotong Royong), dan MKGR

(Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), Ormas Pertahanan dan Keamanan (OPK), dan Gerakan Pembangunan (GP) (Wilson, 2013).

Berdirinya Golkar, diawali dengan mempunyai organisasi sayap pemuda antara lain KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia), Pemuda Pancasila (PP), dan IPK (Ikatan Pemuda Karya) yang militan terhadap partai politiknya, begitupun dengan partai politik lainnya yang ada di Indonesia muncul dari beberapa satuan petugas, laskar, organisasi sayap, dan organisasi masyarakat (Wilson, 2013).

Lengsernya era Orde Baru (orba) pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai liberalisasi sistem politik dan juga liberalisasi bagi para “tukang pukul” yang ada dalam organisasi masyarakat, satuan petugas partai politik dan “preman” yang saling bersaing dalam memperebutkan patronase wilayah untuk memperluas kekuasaan dan juga perebutan bagi para pengikutnya (Wilson, 2013). Di beberapa wilayah keterlibatan organisasi masyarakat dalam politik untuk mendukung kemenangan calon pemilihan kepala daerah, calon anggota legislatif, ataupun presiden yang diusung untuk mendukung perolehan suara kemenangan yang mayoritas sudah tidak menjadi rahasia lagi. Peran mereka dan kelompoknya sudah menjadi mediator ahli dalam dinamika politik sebagai

penghubung antara kelompok sosial dengan dunia politik yang lebih formal (Wilson, 2013).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di berbagai daerah memiliki satuan petugas (satgas), laskar, organisasi sayap, dan organisasi masyarakat, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada era tahun 1997-1982 PPP memiliki pasukan keamanan (paskam) dari kumpulan “*gali*” sebuah akronim dari gabungan anak liar, mereka adalah orang-orang yang berani untuk mengawal proses jalannya kampanye pada setiap pemilihan umum.

Dari pasukan keamanan “yang ruang lingkupnya kecil hanya mengawal proses kampanye kemudian beralih dengan satuan petugas (satgas), laskar, dan kemudian organisasi masyarakat untuk memperluas ruang gerak dalam perpolitikan” (Wawancara dengan Pristiawan Buntoro, 2 April 2021). Organisasi masyarakat memiliki loyalitas dan militansi, ada tiga (3) nama organisasi masyarakat yang basis massanya kuat dan mempunyai nama besar dalam mendukung PPP, organisasi masyarakat tersebut anggotanya tersebar di kabupaten dan kota di DIY, diantaranya yaitu: Brigade Joxzin yang lebih dikenal dengan sebutan Joxzin (Jxz), Hamka Darwis (HD), dan Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) walaupun ada nama organisasi masyarakat lainnya.

Joxzin generasi awal atau pertama terbentuk oleh salah satu pendirinya, yaitu Inung Nurzani Setiawan yang lebih dikenal dengan nama Inung, Joxzin muncul dari rakyat sipil biasa “komunitas geng sekolah remaja SMA Muhammadiyah I dan II” pada tahun 1980an di daerah Karangajen, dan juga satu komunitas “*Pojox Bensin*” anak muda Kauman yang nongkrong di pojok Alun-alun Utara, serta *club minicross* yang “*mriyayi*” (elite) kemudian bermetamorfosis menjadi geng sepeda BMX yang bersatu. Sebutan atau istilah nama pada awal berdiri Joxzin yaitu “*Joko Zhinting*, kemudian *Jogja Islamic Sindikat*, dan selanjutnya adalah *Jogjakarta Islamic Never Die*”, nama istilah yang terakhir sampai saat ini merupakan nama resmi yang digunakan oleh generasi kedua.

Joxzin generasi kedua (Brigade Joxzin) berdiri pasca lengsernya Orde Baru (orba) yang kembali dimunculkan dan dibentuk lagi karena sudah lama vakum oleh Hery Prasetyo yang lebih dikenal dengan nama panggilan Sotong atau “Ndan ST” pada tahun 2001, dan mulai terlibat dalam politik, bukan hanya memeriahkan kampanye saja, tetapi terlibat dalam memobilisasi massa kampanye dan dukungan suara terhadap PPP untuk meraup suara mayoritas dan kemenangan yang berhubungan langsung dengan massa pemilih.

Praktik patronase politik mulai muncul dan berkembang yang awalnya kedudukan elite organisasi masyarakat dan elite partai politik belum setara atau sederajat dalam perihal kekuasaan dan kekuatan, elite partai politik masih mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang mendominasi, dengan praktik patronase politik tersebut muncullah perlahan-lahan kekuasaan dan kekuatan dari elite organisasi masyarakat Brigade Joxzin.

Dukungan Brigade Joxzin terhadap PPP sering memenangkan calon yang diusung dan memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan legislatif yang ada di kabupaten atau kota di DIY. Pada tahun 2014 Brigade Joxzin mendukung beberapa calon legislatif dari PPP. Di bawah ini adalah tabel kemenangan anggota legislatif yang didukung oleh Brigade Joxzin pada pemilihan calon legislatif tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan berhasil duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Yogyakarta masa periode tahun 2014-2019:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu**  
**Anggota DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2014**  
**Daerah Pemilihan Kota Yogyakarta**

Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara	Total
Sila Rita, S.H, M.H	1,305	1,305
Ida Ariyani, S.Hut	723	723

--	--	--

Sumber: <https://diy.kpu.go.id>

Tabel di atas menandakan keberhasilan dukungan Brigade Joxzin dengan massanya dalam mensukseskan Sila Rita, S.H, M.H, dan Ida Ariyani, S.Hut menjadi anggota DPRD kota Yogyakarta masa periode 2014-2019. Dukungan Brigade Joxzin dalam mendukung PPP “pada pemilu tahun 2014 ditandai melonjaknya suara PPP kota Yogyakarta yang naik hampir 300% suara atau mendapatkan 1.300 suara lebih” (<https://diy.kpu.go.id>; Wawancara dengan Chaniago Iseda, 29 Mei 2018).

Dari hubungan patronase politik dengan partai politik hasil yang diperoleh atau didapat Brigade Joxzin adalah keuntungan perlindungan ketika elitnya berbenturan dengan permasalahan hukum, mudahnya membuat ijin untuk lahan parkir yang dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai contoh lahan parkir dan keamanan sebelah Utara Mirota Batik atau Mirota Hamzah, mudahnya mendapatkan ijin lahan sebagai keamanan untuk pasar, acara pesta rakyat, tempat-tempat wisata seperti daerah Prawirotaman, tempat-tempat perbelanjaan seperti Superindo di jalan Parangtritis, dan acara besar automotive yang ada di kabupaten dan kota.

Brigade Joxzin tidak hanya mendukung elite dari PPP, tetapi bisa juga mendukung elite partai politik lain seperti elite

dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dengan instruksi “satu komando” ketua atau komandannya. Kondisi ini terkadang memunculkan sedikit perdebatan di partai politik PPP. Dalam mendukung elite partai politik lain yang biasanya karena kedekatan pribadi antara ketua atau komandan Brigade Joxzin dengan elite partai politik yang didukung.

Joxzin saat ini (Brigade Joxzin) dari anggotanya belum ada yang mencalonkan diri untuk maju menjadi calon anggota legislatif, tetapi kalau pendiri Joxzin generasi pertama ada yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan aktif dalam organisasi masyarakat Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) kabupaten Bantul. Pada pemilihan umum tahun 2019 Brigade Joxzin tetap mendukung untuk kemenangan calon Presiden Prabowo Subianto, sama halnya ketika mereka mendukung untuk kemenangan Presiden pada tahun 2014. Tahun 2019 Brigade Joxzin juga mendukung calon legislatif (caleg) yang diusung dari PPP, perihal tersebut melihat kesuksesan Brigade Joxzin pada dukungan terhadap calon legislatif tahun 2014.

Pada pemilihan umum serentak 2019 Brigade Joxzin satu komando mengajak masyarakat untuk melaksanakan pemilihan umum tahun 2019 dengan damai. Brigade Joxzin membuat sebuah deklarasi damai pada tanggal 16 Desember 2018 di Markas komando Brigade Joxzin yang bertempat di Karangunthi Yogyakarta. Deklarasi dilaksanakan untuk

terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa agar terwujud kehidupan yang aman, damai, sejahtera, serta berkeadilan sosial di masyarakat, khususnya di DIY.

Mengutip dari ketua Brigade Joxzin “Jika sulit menyatukan perbedaan maka satukanlah persamaan yang ada dan lupakan perbedaan, ajaran agama kita melarang adanya perbedaan pendapat dalam pandangan politik” (Wawancara dengan Heru, 2 April 2019), deklarasi pemilu damai dilakukan karena pada tahun 2019 merupakan pemilihan umum yang sangat panas pasca reformasi dan juga adanya kisruh internal karena munculnya dualisme kepemimpinan dalam kepengurusan PPP.

Hubungan patronase politik antara Brigade Joxzin dengan PPP bukan hanya terjadi pada pemilihan umum tahun 2019, tetapi juga terjadi pada pemilihan umum tahun 2014. Dalam penelitian ini, penulis akan melihat hubungan patronase politik antara organisasi masyarakat Brigade Joxzin (Joxzin) dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana keterlibatan Brigade Joxzin dalam patronase politik pada pemilihan umum tahun 2019?”

1. Bagaimana proses keterlibatan Brigade Joxzin dalam patronase politik?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Brigade Joxzin terlibat dalam patronase politik?
3. Bagaimana relasi antara aktor Brigade Joxzin dan PPP?
4. Bagaimana dampak keterlibatan patronase politik Brigade Joxzin terhadap PPP?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan proses dan faktor keterlibatan Brigade Joxzin dalam politik, dan hubungan patronase politik antara Brigade Joxzin dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2. Menjelaskan relasi hubungan aktor yang ada di dalam organisasi masyarakat dan partai politik.
3. Untuk menemukan dan menjelaskan perkembangan dari teori patronase.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan praktis, serta memberikan rekomendasi masukan positif perkembangan relasi aktor

bagi organisasi masyarakat dan partai politik dalam patronase politik.

2. Penelitian ini memberi sumbangan metodologis bagi ilmu sosial dan ilmu politik tentang perkembangan dari partai politik dan organisasi masyarakat dalam hubungan patronase politik.
3. Penelitian ini memberikan sumbangan teori, khususnya perkembangan teori patronase pada abad duapuluh satu (21) dalam lingkungan akademik.